

ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM AKUNTABILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH:
SUATU STUDI KUALITATIF

(Tesis)

Oleh

YANNISA RAHMAWATI



PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019

ABSTRAK

ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH SUATU STUDI KUALITATIF

OLEH

YANNISA RAHMAWATI

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam akuntabilitas laporan keuangan daerah dengan menggunakan analisis model interaktif. Penelitian ini dilakukan pada tiga daerah pemekaran di provinsi Lampung. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bagian Perencanaan Anggaran, bagian Perbendaharaan dan bagian Akuntansi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, uji validitas data dengan metode triangulasi dan analisis serta manajemen data kualitatif menggunakan software NVivo.

Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang akuntabilitas laporan keuangan daerah yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) melalui media komputer dan bantuan jaringan internet serta penggunaan website untuk memudahkan penyampaian informasi. Penggunaan program aplikasi SIMDA dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga laporan yang dihasilkan oleh program aplikasi SIMDA tersebut akan akuntabel. Sedangkan untuk kompetensi sumber daya manusia terkait latar belakang pendidikan, pendidikan akuntansi tidak lagi menjadi pendidikan yang harus dimiliki oleh SDM yang mengelola keuangan pada pemerintah daerah karena dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan manajemen keuangan. Melalui pelatihan atau bimbingan teknis pemerintah daerah dapat menambah kompetensi dan kemampuan setiap pegawai pemerintah daerah dalam memahami dan menjalankan tugas yang diberikan, namun masalah yang terjadi pada pemerintah daerah yaitu melakukan pemindahan tugas baik pada unit lain bahkan daerah lain untuk SDM yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan keuangan melalui pelatihan yang diberikan.

Kata kunci : SIMDA, Pelatihan, Akuntabilitas keuangan, Nvivo

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND HUMAN RESOURCE COMPETENCIES IN THE ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL REPORTS: A QUALITATIVE STUDY

BY

YANNISA RAHMAWATI

This study aims to provide information about the use of information technology and human resource competencies in the accountability of regional financial reports by using an interactive model analysis. This research was conducted in three regional expansion in Lampung province. Informants in this study were 9 people in the Financial Management Agency and Regional Assets in the budget planning section, Treasury section, and Accounting section. Data collection techniques by interview, test data validity by triangulation and analysis methods and qualitative data management using NVivo software.

The results showed the use of information technology in supporting the accountability of regional financial reports using the Regional Management Information System (SIMDA) through computer media and internet network assistance and the use of websites to facilitate the delivery of information. The use of the SIMDA application program was developed in accordance with statutory regulations and government regulations that are used by local governments as guidelines in the implementation of regional financial management so that the reports produced by the SIMDA application program will be accountable. As for human resource competencies related to educational background, accounting education is no longer an education that must be owned by HR who manage finances at the local government because it can be adjusted to the educational background of financial management. Through training or technical guidance the local government can increase the competence and ability of each local government employee in understanding and carrying out the tasks assigned, but the problem that occurs in local governments is to carry out the transfer of tasks to other units and even other regions for human resources who already have the ability and knowledge adequate about financial management through the training provided.

Keywords: Regional management information systems, Training, Financial accountability, NVivo software.

ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM AKUNTABILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH:
SUATU STUDI KUALITATIF

Oleh

Yannisa Rahmawati

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI

Pada

Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019

Judul Tesis : **ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA DALAM AKUNTABILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH: SUATU
STUDI KUALITATIF**

Nama Mahasiswa : **Yannisa Rahmawati**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1721031012

Jurusan/Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19710802 199512 2 001

Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.
NIP 19730723 199903 1 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si
NIP 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt

Penguji Utama : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.

Sekretaris Penguji: Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc. Akt

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP 19570101 198403 1 020

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Agustus 2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan ataupun sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya baik dalam tulisan atau di daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019



Yannisa Rahmawati

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di desa Batu Palano kota Bukittinggi, Padang Provinsi Sumatera Barat pada 23 April 1993, putri ketiga dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Bapak Yuharmen dan Ibu Yanti Nila Wati.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Pringsewu Kec. Pringsewu pada tahun 1998 dan lulus pada tahun 2004, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Pringsewu lulus tahun 2007. Sempat menunda untuk melanjutkan pendidikan selama dua tahun kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan pada SMK Muhammadiyah 1 Pringsewu dan mengambil jurusan Akuntansi Keuangan lulus tahun 2012. Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan Strata I pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu program pendidikan Manajemen konsentrasi Keuangan dan lulus pada bulan Februari tahun 2017. Tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung lulus pada bulan agustus 2019 dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1721031012.

MOTTO

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan” (Ali bin Abi Thalib)

“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang member manfaat”
(Imam Syafi’i)

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah 5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang terus memberikan nikmat, baik nikmat sehat, nikmat iman dan menjadikan segala sesuatu yang sulit menjadi mudah. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terutama untuk Ayahanda tercinta Yuharmen yang telah banyak memberikan nasehat serta dukungan dalam hidup saya dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, untuk Ibunda tersayang Yanti Nila Wati yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan masukan yang sangat berarti untuk terus berjuang dalam hidup ini semoga ibunda selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, untuk suamiku Angger Hadi Purwanto yang selalu sabar dan memberikan kasih sayangnya, juga Anandaku Aayna Azzahra Purwanto yang telah memberikan warna dalam hidup ini, kalian adalah penyemangatku.

Kepada Saudara-saudaraku (Abang Yonanda Saputra, Yunita Haryanti, Febbyansyah Putra, Rini Oktaviyanti, Yay Novi kafori, Keponakan ku tersayang Rafa Al-farizi Ramadhan dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu) terima kasih atas kasih sayang dan dukungan dari kalian semua, semoga kita tetap bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin YRA.

SAN WACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, Keluarganya beserta sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau.

Alhamdulillah atas Kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul *“Analisis pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam akuntabilitas laporan keuangan daerah: suatu studi kualitatif”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik moril maupun materil. Sehingga dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku ketua program studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung sekaligus selaku penguji

utama yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi dalam penyelesaian tesis ini dengan baik.

4. Ibu Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku sekretaris program studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan ilmunya dalam banyak hal selama menempuh pendidikan ini.
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku pembimbing I yang telah membimbing serta banyak memberikan masukan dan koreksi sampai terselesaikannya tesis ini dengan baik.
7. Bapak Yuliansyah. S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, membimbing serta dan memberikan koreksi yang sangat berguna hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.
8. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc. Akt., selaku sekretaris penguji yang terus memberikan masukan dan koreksi yang bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini dengan baik.
9. Seluruh dosen Program Studi Megister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung terima kasih tak terhingga atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh staf dan karyawan program studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung terima kasih atas pelayanan akademiknya semoga menjadi lading ibadah bagi kalian semua.
11. Suamiku tercinta Angger dan Anandaku Aayna kalian berdua adalah belahan

jiwa dan belahan hati yang selalu memberikan semangat umi dalam menempuh pendidikan ini semoga kelak ilmu ini bermanfaat untuk kita semua.

12. Teman-teman seperjuangan (Mas Berwin, Mas Irfan, Mas Rahmat, Mas Eman, Mas Lukman, Mas Syahrial, Tio, Iqbal, Wayan, Mba Vera, Mba Ayu, Dewi, Elsa, Mba Igo, Shaumi, Ulin, Mba Vivin, Cesa, Mba Bety, Mba Ima) semoga kesuksesan menyertai kita semua Amin YRA.

13. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari BPKAD Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang Barat dan Pesawaran yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini, tanpa kalian semua ini tidak akan berarti, terima kasih tak terhingga penulis ucapkan.

14. Almamaterku tercinta, dan

15. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal tapi tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan serta kekeliruan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, dan akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi Universitas Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Batasan Penelitian	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kerangka Teori.....	9
2.1.1. Teori Agensi.....	9
2.1.2. Akuntabilitas Keuangan	10
2.1.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi	12
2.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	14
2.2. Penelitian Terdahulu.....	15
2.3. Kerangka Pemikiran	18
BAB III	19
METODE PENELITIAN.....	19
2.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data	19
2.2. Teknik Pengumpulan Data	20
3.3. Informan Penelitian	22
3.4. Metode Analisis	23
3.5. Metode Keabsahan Data.....	26
BAB IV	29
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29

4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	29
4.2.	Karakteristik Informan Penelitian	30
4.3.	Hasil Penelitian.....	32
4.4.	Pembahasan	34
4.4.1.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	34
4.3.2.	Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	44
BAB V.....		53
SIMPULAN DAN SARAN		53
5.1.	Simpulan.....	53
5.2.	Implikasi	54
5.3.	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1.	Perkembangan opini BPK atas LKPD daerah Pemekaran Provinsi Lampung	5
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1.	Karakteristik Informan	31
Tabel 4.2.	Hasil analisis data wawancara.....	33
Tabel 4.3.	Latar belakang pendidikan bagian pengelola keuangan.....	45
Tabel 4.4.	Kekuatan dan kelemahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.1.	Grafik Perkembangan Opini LKPD daerah pemekaran tahun 2009-2017	4
Gambar 1.2.	Grafik opini LKPD daerah pemekaran tahun 2017	5
Gambar 3.1.	Analisis Model Interaktif	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat telah mendorong pemerintah untuk dapat menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban pemegang amanah (agent) dalam memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada pemberi amanah (principal) (Mardiasmo, 2002). Dalam konteks keuangan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan pengelolaan keuangan, sasaran dari pertanggungjawaban adalah laporan keuangan (BPKP, 2000). Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Andriani, 2010).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga terwujud akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah. Peningkatan

kualitas informasi perlu dilakukan untuk mendorong akuntabilitas dan kinerja dalam organisasi sektor publik (Damayanti *et al.*, 2013). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah didukung dengan sistem akuntansi, sistem informasi dan dikelola oleh sumber daya yang memiliki latar belakang yang sesuai dan bertanggungjawab dalam pelaporan keuangan (Firdaus, 2017). Dalam pengantar Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa salah satu upaya nyata untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip waktu (Yahya, 2006). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan public dalam praktek, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman serta informasi yang memadai) (Insani, 2009).

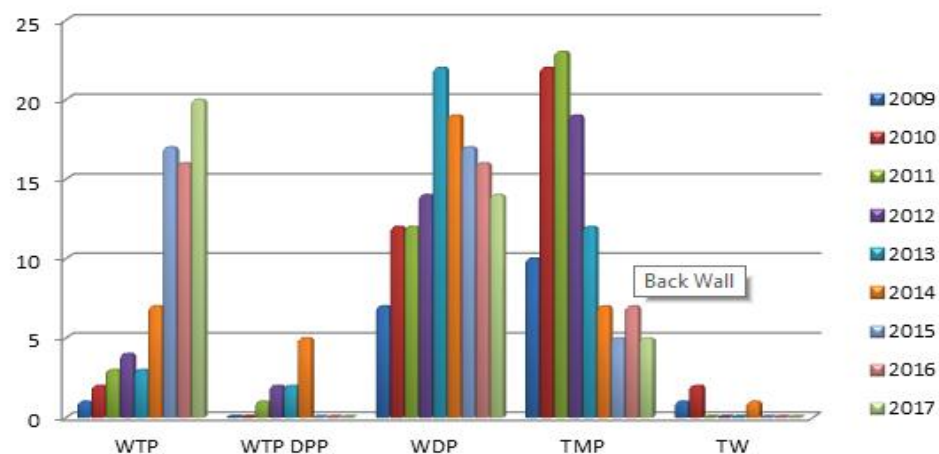
Pemanfaatan teknologi informasi yang dirasa dapat menunjang dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Keberadaan Website pemerintah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang memudahkan stakeholder dalam mengakses informasi (Nurrizkiana *et al.*, 2017). Laporan keuangan menjadi sumber informasi bagi stakeholder sehingga ketepatan dan kemampuan sumber daya manusia penyelenggaraan pemerintah daerah haruslah mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang ada,

(Fontanella, 2010). Dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan, pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten (Kalumata *et al.*, 2016). Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan system akuntansi yang baik maka diperlukan sumber daya manusia yang berkapasitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Hanafi, 2013).

Khusus dilihat dari aspek keuangan, pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 memaknai akuntabilitas sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan (Badan Keahlian DPR, 2017). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menyebutkan secara tegas bahwa BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Afriyanti *et al.*, 2015). Dalam menilai akuntabilitas oleh BPK adalah melalui pemberian opini pada laporan keuangan. Bagi kelembagaan pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan daerah tercermin pada kualitas opini yang dinyatakan BPK RI dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah (Badan Keahlian DPR, 2017). Khusus opini Wajar Tanpa Pengecualian yang memuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai SAP melahirkan ekspektasi bahwa entitas tersebut sudah memenuhi unsur transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya (Badan Keahlian DPR, 2017).

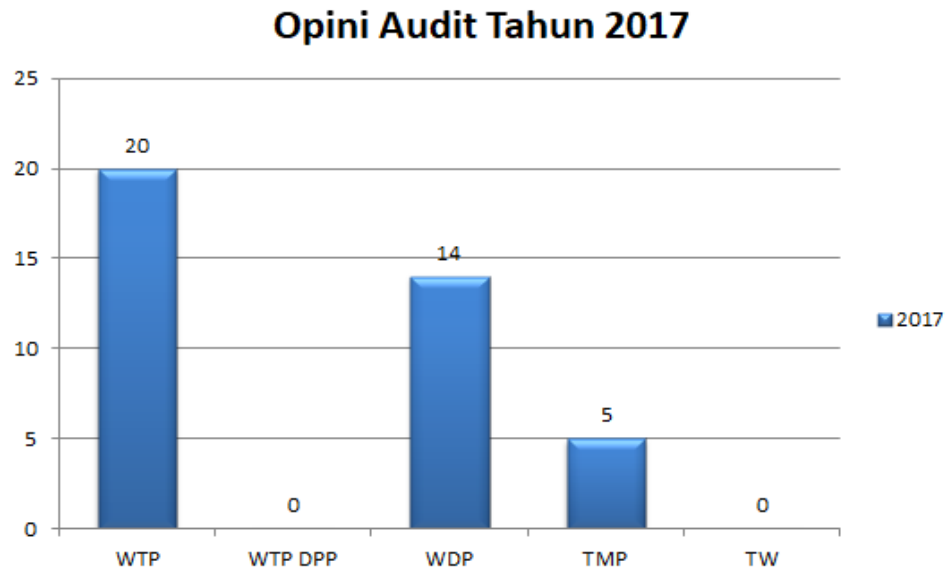
Dalam penelitian ini melihat pada ikhtisar hasil pemeriksaan oleh BPK khususnya untuk daerah pemekaran yang disahkan melalui undang-undang pada tahun 2007 & 2008 yaitu terdapat 39 pemerintah kabupaten menyatakan dalam kurun waktu kurang lebih selama 10 tahun (laporan tahun 2009-2017) terdapat peningkatan mulai dari opini Tidak Wajar hingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Gambar 1.1. Grafik Perkembangan Opini LKPD daerah pemekaran tahun 2009-2017



Namun opini yang diberikan untuk laporan 2017 baru 20 (51%) pemerintah kabupaten yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 14 (36%) pemerintah kabupaten memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan sisanya 5 (13%) pemerintah kabupaten memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dapat dilihat dari grafik berikut ini.

Gambar 1.2. Grafik opini LKPD daerah pemekaran tahun 2017



Dari 20 (51%) pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP oleh BPK RI, provinsi lampung dengan 4 daerah pemekaran termasuk dalam daerah pemerintah kabupaten yang seluruh nya memperoleh opini WTP pada tahun 2017. Dilihat dari table berikut ini.

Tabel 1.1.
Perkembangan opini BPK atas LKPD daerah pemekaran Provinsi Lampung

No	Entitas	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Mesuji	-	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Pesawaran	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3	Kab. Pringsewu	-	TMP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Tulang Bawang Barat	-	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPK, IHP Semester I Tahun 2013 & 2018

Dilihat dari tabel 1 diatas, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pada daerah pemekaran di Provinsi

Lampung dari tahun anggaran 2009 sampai 2017, telah mengalami kenaikan tingkat opini yaitu opini dari tidak memberikan pendapat (TMP) menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) dan meningkat kembali ke wajar tanpa pengecualian (WTP) yang berarti adanya perbaikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdaus (2017) menyimpulkan bahwa sistem informasi di bagi menjadi tiga yaitu software, hardware dan brainware, dimana penggunaan software SIMDA cukup membantu dalam menyelesaikan tugas, ketersediaan hardware harus sesuai dengan kebutuhan, dan brainware yaitu operator yang bertanggungjawab dalam pelaporan keuangan harus memiliki latarbelakang pengetahuan yang sesuai dan mengikuti pelatihan akuntansi dan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasih & Koeswayo (2014) mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan berdampak terhadap akuntabilitas. Penelitian Oktari (2013) menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi tidak mendukung kinerja instansi pemerintah. Kalumata *et al.* (2016) dijelaskan bahwa kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan, sedangkan dalam proses penyusunan laporan keuangan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dalam menyusun laporan keuangan tidak diperlukan pengetahuan yang memadai tentang siklus akuntansi. Hanafi (2013)

kapasitas SDM dengan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan akan menghambat dalam ketepatanwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu dalam ketepatanwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan karena memiliki keunggulan dari sisi kecepatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat interpretasi yang berbeda-beda dan masih kurangnya penelitian terkait dengan akuntabilitas pelaporan keuangan. Penelitian ini untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan faktor penentunya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia, pengambilan objek penelitian pada daerah pemekaran di Provinsi Lampung yang dalam pengelolaan keuangannya dinilai sudah akuntabel dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk laporan keuangan tahun 2017. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada daerah yang mengalami peningkatan dalam pemberian opini atas laporan keuangan oleh BPK RI.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi digunakan dalam mengelola

keuangan daerah?

2. Apakah kompetensi sumber daya manusia sudah sesuai dalam mengelola keuangan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Memperoleh informasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola keuangan daerah
2. Memperoleh informasi tentang kompetensi sumber daya manusia apakah sudah sesuai dalam mengelola keuangan daerah.

1.4. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada daerah pemekaran di Provinsi Lampung.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada OPD yang laporan keuangannya diaudit oleh BPK RI juga selaku Bendahara Umum Daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada 3 (tiga) daerah pemekaran di Provinsi Lampung, tanpa melibatkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi (Kalumata *et al.*, 2016). Jensen dan Mecling (1976) dalam Santoso (2016) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen untuk mencapai tujuan tertentu dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Teori agensi adalah dasar dari pemikiran tentang adanya perbedaan informasi antara principal dan agen atau adanya informasi asimetri yang dapat mempengaruhi penggunaan sistem akuntansi (Shield dan Young, 1993) dalam Atainah (2002). Teori agensi berkaitan dengan hubungan antara anggota-anggota dalam organisasi. Teori keagenan mengasumsikan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan, bahwa prinsipal adalah *risk-neutral* dan agen adalah *risk and effort averse* (Santoso, 2016).

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk pertanggungjawaban agen kepada principal atas pengelolaan sumber daya yang dibuat sebagai bentuk untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Semakin menguatnya tuntutan terhadap lembaga-lembaga publik untuk mewujudkan akuntabilitas sector publik, mengharuskan pemerintah daerah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Kalumata *et al.*, 2016).

2.1.2. Akuntabilitas Keuangan

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja (PSAP KK, 2010). Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas menurut Sadjiarto (2000) dalam Zeyn (2011).

Akuntabilitas finansial merupakan kewajiban dari setiap orang atau institusi untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan sumber daya publik dalam pelaksanaan kewenangan publik yang mereka pegang (Afriyanti *et al.*, 2015). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (publik money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi (Zeyn, 2011). Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002). Tahap-tahap dalam akuntabilitas keuangan mulai dari perencanaan keuangan (penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, hingga pelaksanaan pelaporannya (Zeyn, 2011). Dengan kata lain akuntabilitas adalah kewajiban entitas dalam melaporkan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara komprehensif (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 memaknai akuntabilitas sebagai kewajiban pemerintah untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Akuntabilitas keuangan daerah tercermin pada kualitas opini yang dinyatakan oleh BPK RI dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Badan Keahlian DPR, 2017).

Badan Pemeriksa Keuangan melalui opini laporan keuangan dengan melakukan pemeriksaan keuangan, dilakukan untuk menilai akuntabilitas laporan keuangan pemerintah (Afriyanti *et al.*, 2015). Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan keputusan BPK RI nomor 4/K/I-XIII.2/9/2012 paragraf 13 tentang jenis opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat.

2.1.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peraturan pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang system informasi keuangan daerah menjelaskan kewajiban pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi. Tuntutan masyarakat agar terbentuknya sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, melahirkan dua hal utama dalam pengertian e-

government, yaitu penggunaan teknologi informasi dan tujuan pemanfaatannya (Nurhakim, 2014). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi Wilkinson *et al.* (2000) dalam Hanafi (2013).

Martin *et al.* (2005) dalam Hanafi (2013) teknologi informasi merupakan kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam teknologi komputer untuk mengolah dan menyimpan informasi dan melakukan transmisi informasi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk memproses dan penyimpanan informasi juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Kalumata *et al.*, 2016). Teknologi sistem informasi (*hardware* dan *software*) diperlukan untuk memudahkan dalam proses informasi, agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu (Andriani, 2010).

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah (Chintya, 2015). Pemerintah perlu melakukan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan stafnya.

2.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia salah satu unsur penting dalam organisasi, selain itu sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk dapat mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki seseorang melalui pendidikan dan pelatihan untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan tugasnya (Susanto, 2018). Kompetensi adalah keterampilan yang cukup untuk melakukan suatu tugas atau sebagai keterampilan dan kemahiran yang diperlukan menurut Herlambang (2014) dalam Sagara (2015). Komponen kompetensi meliputi pengetahuan, eksperimental, etika dan keterampilan subjektif serta objektif menurut Nur Afiah (2004) dalam Indriasih & Koeswayo (2014).

Widodo (2001) dalam Sukmaningrum (2012) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. SDM yang berkualitas akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah merupakan dampak yang ditimbulkan atas pemilihan SDM yang tidak berkualitas.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Sumber
1	Merlyn C. T. Kalumata, Ventje Ilat, Jessy D. L. Warongan	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Kompetensi SDM dalam hal pengetahuan tidak sepenuhnya mendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas Teknologi informasi, reviu laporan keuangan dan system pengendalian internal menunjang dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.	Jurnal Accountability, Universitas Sam Ratulangi, Volume 5 no 2, 2016
2	Rustam Hanafi	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rendahnya tingkat pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan pengelolaan data berdampak pada keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Pemanfaatan teknologi informasi membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi hingga penyajian laporan keuangan.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No 16, Oktober 2013, Hal. 85-105

3	Sardio Kartopawiro dan Yohanes Susanto	Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas	kualitas laporan keuangan daerah ditunjang oleh tingkat kompetensi aparatur yang mampu menguasai teknis pengelolaan keuangan daerah.	Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol. 16, No. 1 2018
4	Yusar Sagara	The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reporting	Penerapan sistem informasi akuntansi akan berdampak pada hasil laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi sumber daya manusia tidak menunjang dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas	Research Journal of Finance and Accounting, Vol.6, No.10, 2015
5	Dewi Indriasih dan Poppy Sofia Koeswayo	The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting And Its Impact On The Performance Accountability In Local Government	Kompetensi sumber daya manusia yang sesuai akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan kemudian akan berdampak pada akuntabilitas kinerja.	South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. Vol. 5, Issue 1, Dec 2014
6	Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh	Pengaruh Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Penendalian Intern dan system akuntansi keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 2, 2017, Hal 874-890
7	Loli Efendi, Darwanis, Syukriy Abdullah	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah akan meningkatkan kualitas pada laporan keuangan	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 3, No. 2, September 2017
9	Chandra Putra Immanuel Momuat	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dalam	Pemanfaatan teknologi informasi telah mendukung pada ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan sehingga terwujud	Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 4 No. 1, Maret

		Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas	transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.	2016, hal 1519-1530
10	Diyah Santi Hariyani dan Muhamad Agus Sudrajat	Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Penggunaan Teknologi <i>Accounting Information System</i> pada Desa-Desa di Kabupaten Madiun	Kompetensi aparatur pemerintah desa tidak menunjang dalam penggunaan teknologi <i>Accounting Information System</i> pada desa-desa di Kabupaten Madiun.	Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, Oktober 2016
11	Febriana F. Albugis	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Provinsi Sulut telah transparan dan akuntabiliti karena Sistem dan Prosedur keuangan dengan dimulainya penyusunan Neraca Awal oleh Pemerintah Provinsi Sulut telah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 4, No. 3, September 2016, Hal. 078-089
12	Patras Thebora, Jenny Morasa, Sintje Rondonuwu	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada BPK-AD Kantor Walikota Manado	Kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi namun tidak menjadi penghalang dalam ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak meningkatkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 2, 2017, Hal. 575-593

2.3. Kerangka Pemikiran

Pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kontribusi yang besar dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, namun demikian tidak sepenuhnya teknologi informasi dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi tidak lepas dari perilaku individu-individu yang memanfaatkan teknologi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, berupa faktor sosial dan faktor institusional dimana individu berinteraksi dalam organisasi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi pemerintah dan pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada masyarakat.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai, sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang memadai akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten dan deskripsi jabatan yang jelas maka akuntabilitas keuangan daerah mustahil untuk dapat diwujudkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling dengan kriteria yaitu daerah yang merupakan wilayah administratif baru atau daerah pemekaran di tingkat kabupaten yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selama 10 tahun. Daerah kabupaten/kota berupa pemekaran yang telah memenuhi syarat administrasi berupa keputusan DPRD kabupaten induk, Bupati/Walikota, DPRD provinsi, keputusan Gubernur, serta rekomendasi Menteri tentang pembentukan kabupaten/kota, syarat teknis berupa factor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas

daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintah daerah, dan syarat fisik kewilayahan berupa cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Penelitian ini dilakukan pada 3 daerah pemekaran yaitu kabupaten Pringsewu, kabupaten Tulang Bawang Barat dan kabupaten Pesawaran yang merupakan daerah pemekaran dari daerah induknya yaitu kabupaten Tanggamus, kabupaten Tulang Bawang dan kabupaten Lampung Selatan.

Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau merekonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam akuntabilitas laporan keuangan daerah.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2007) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2007) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan wawancara, maka akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis-jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2007). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

3.3. Informan Penelitian

Sampel dalam penelitian kualitatif selanjutnya disebut sebagai partisipan atau informan (Sugiyono, 2017). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan pada Bagian Perencanaan Anggaran (BPA), Bagian Perbendaharaan (BPB), dan Bagian Akuntansi (BAK). Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala bidang yang memiliki tugas membantu kepala badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dimasing-masing bidangnya, kepala sub bidang yang memiliki tugas membantu kepala bidang dalam pelaksanaan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis dimasing-masing bidangnya, dan staf/operator sebagai pelaksana dalam mengoperasikan sistem informasi akuntansi.

Jumlah informan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan pendapat dari Smith (2003) menyatakan bahwa jumlah informan dalam penelitian kualitatif yaitu rentang 6-8 (enam sampai delapan) sudah memenuhi persyaratan. Guest *et al.* (2008) data menjadi jenuh setelah 12 (dua belas) informan pertama dan bahkan setelah 6 informan awal. Berdasarkan hal tersebut jumlah informan dalam penelitian ini antara 6 hingga 12 individu.

3.4. Metode Analisis

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi terkait akuntabilitas laporan keuangan dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara mulai dilakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diberikan oleh informan dirasa kurang memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh.

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain:

a. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci.

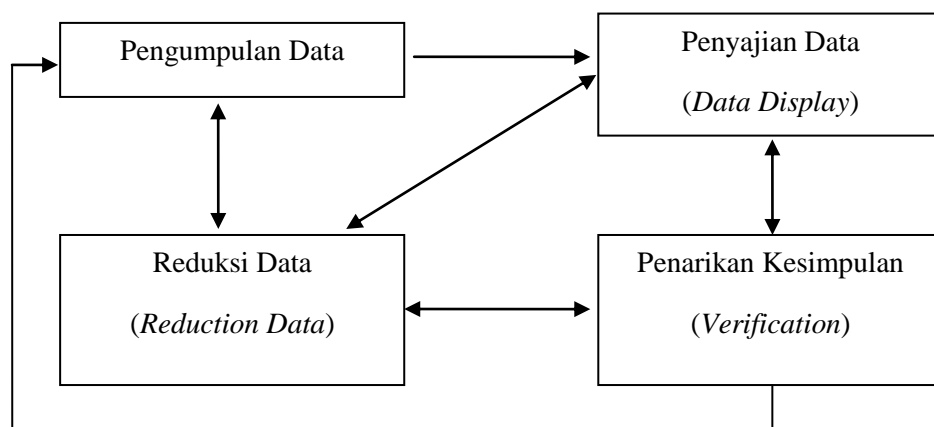
b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data dari informan dilakukan analisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

Berikut adalah gambar dari analisis data dan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007)



Sumber: Sugiyono (2007)

Gambar 3.1. Analisis Model Interaktif

Gambar mengenai komponen analisis data model Miles dan Huberman diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Data dianalisis menggunakan pengkodean teks dari dokumen (Yuliansyah, 2015). Hasil wawancara akan dianalisis dengan proses coding menggunakan *software* pengolahan dan manajemen data yaitu berupa aplikasi NVivo. NVivo adalah alat manajemen data yang dirancang untuk menganalisis data hasil penelitian kualitatif. *Output* coding data dari NVivo yaitu *word frequency query result* dan *explore diagram codes* sebagai dasar pengolahan data. Penggunaan komputer dalam proses analisis penelitian kualitatif dapat menambah ketelitian sehingga menghasilkan analisis yang terpercaya (Yuliansyah *et al.*, 2012).

NVivo adalah perangkat lunak untuk mengolah data kualitatif yang paling banyak digunakan oleh akademisi dan peneliti profesional di seluruh dunia. NVivo digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu perilaku, penelitian medis, psikologi, pendidikan, ilmu social dan ilmu politik. NVivo juga ideal untuk proyek penelitian pemerintah dan bisnis yang kompleks, seperti yang dilakukan dalam penelitian sumber daya manusia, pemasaran, hukum dan lainnya. Fungsi penggunaan aplikasi NVivo salah satunya adalah untuk memastikan pengambilan keputusan kebijakan pemerintah termasuk penganggaran dan pengawasan (www.qsrinternasional.com)

3.5. Metode Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) atas kehandalan (reabilitas). Derajat kepercayaan atau

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standard apa yang digunakan. Menurut Moleong (2007) terdapat beberapa criteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, antara lain:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu pertama penemuannya dapat dicapai, kedua mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian pada kenyataan yang sedang diteliti. Criteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

A. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu dilakukan dengan cara

- a. Mengajukan berbagai variasi pertanyaan
- b. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan wawancara
- c. Mengeceknnya dengan berbagai sumber
- d. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan

Berdasarkan hasil triangulasi tersebut, maka akan sampai pada salah satu kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak

konsisten, atau berlawanan. Selanjutnya mengungkapkan gambaran yang lebih memadai mengenai gejala yang diteliti.

B. Kecukupan Referensial

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam akuntabilitas laporan keuangan daerah pada daerah pemekaran di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengolahan manajemen data kualitatif NVivo.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang akuntabilitas laporan keuangan daerah yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) melalui media komputer dan bantuan jaringan internet serta penggunaan website untuk memudahkan penyampaian informasi. Penggunaan program aplikasi SIMDA yang merupakan fasilitas dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara telah dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga laporan yang dihasilkan oleh program aplikasi SIMDA tersebut akan akuntabel.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menunjang akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah pada daerah pemekaran di Provinsi Lampung masih kurangnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Latar belakang pendidikan akuntansi tidak lagi menjadi pendidikan yang harus dimiliki oleh SDM yang mengelola keuangan pada pemerintah daerah karena dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang mengerti tentang pengelolaan keuangan seperti manajemen keuangan. Melalui pelatihan atau bimbingan teknis pemerintah daerah dapat menambah kompetensi dan kemampuan setiap pegawai pemerintah daerah dalam memahami dan menjalankan tugas yang diberikan, namun masalah yang terjadi pada pemerintah daerah yaitu melakukan pemindahan tugas baik pada unit lain bahkan daerah lain untuk SDM yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai melalui pelatihan yang diberikan.

5.2. Implikasi

Untuk daerah administratif baru/pemekaran yang laporan keuangannya belum akuntabel yang dinilai melalui opini oleh BPK RI untuk dapat menggunakan serta memahami secara mendalam melalui pelatihan yang diberikan pada pegawai dalam mengoperasikan program aplikasi SIMDA agar laporan keuangannya dapat akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.3. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah pada daerah pemekaran Provinsi Lampung
 - a. Menambah jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada setiap badan yang melakukan pengelolaan keuangan pemerintah.
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk lebih dioptimalkan lagi dengan membangun jaringan teknologi informasi yang lebih stabil guna kelancaran dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Pada SDM yang telah memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk tidak dilakukan pemindahan tugas baik pada unit lain maupun daerah lain guna menjaga akuntabilitas laporan keuangan.
2. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas mencakup dari daerah pemekaran pada wilayah provinsi lainnya
 - b. Melakukan penelitian pada setiap daerah pemekaran, tidak hanya pada daerah yang mengalami peningkatan opini oleh BPK agar hasilnya dapat dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, D., Sabanu, H. G., & Noor, F. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol. 1 No. 1* , 21-42.
- Andriani, W. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 5, No. 1, Juni* , 69-80.
- Atainah, H. (Desember 2002). Perkembangan Penelitian Akuntansi Keprilakuan: Berbagai Teori Pendekatan Yang Melandasinya. *JAAI Vol. 6 No. 2*.
- Badan Keahlian DPR, RI. (2017). *Akuntabilitas & Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.
- BPKP. (2000). *Mengenal Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Tim AKIP BPKP.
- Chintya, I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Solok. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* .
- Damayanti, R. A., Syarifuddin, Darmawati, & Indrijawati, A. (2013). Rekonstruksi Akuntabilitas: Sebuah Tinjauan Akuntansi dan Sistem Informasi dari Perspektif Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 17, No. 2* , 172-191.
- Firdaus, W. S. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 1* , 1357-1368.
- Fontanella, A. (Desember 2010). Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 5 No. 2* , 22-30.
- Hanafi, R. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, No. 16* , 85-105.

- Indriasih, D., & Koeswayo, P. S. (2014). The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting And Its Impact On The Performance Accountability In Local Government. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 5, No. 1 .
- Insani, I. (2009). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Borneo Administrasi* .
- Kalumata, M. C., Ilat, V., & Warongan, J. D. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability, Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 5, No. 2 .
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda.
- Nurhakim, M. R. (2014). Implementasi e-Goverment dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol.XI. No. 3* , 403-422.
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18, No. 1 , 28-47.
- Oktari, A. N. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi, Universitas Riau* .
- Sagara, Y. (2015). The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reporting. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 6, No. 10 .
- Santoso, E. B. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Lampung: Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningrum, T. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Susanto, S. K. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol. 16, No. 1* .
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri Vol. 7, No. 4* , 27-29.
- Yuliansyah. (2015). Attributes Influencing Strategic Alignment in the Service Sector: an Indonesia Banking Sector Case Study. *International Journal of Business, Economics and Management* , 34-48.
- Yuliansyah, Hakim, H. M., & Suryani, A. W. (2012). *Manajemen dan Analisis Data Kualitatif dengan Perangkat Lunak NVivo*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1* , 21-37.
- Dokumen dan Literatur Penunjang
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017*. (2017). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. (2004).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang system informasi keuangan daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- www.bpkp.go.id.